

Konstruksi Ide Xi Jinping Dalam Belt And Road Initiative

Arief Bakhtiar Darmawan¹, Rahmad Agus Dwianto², Herdho Husna Akmal³

¹arief.darmawan@unsoed.ac.id, ²rahmadagusdwiantoumy@gmail.com, ³akmal.husna@gmail.com

^{1,3} Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman

²Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i1.19876

Abstract

This paper aims to understand the role of Xi Jinping's ideas and perceptions about China's rise in the Belt and Road Initiative (BRI). It released by Xi Jinping in 2013 as the one of ambitious policy to drive China's rise as the world power. He has a strong position in Chinese politics. In addition to leading the government, Xi is the military's commander-in-chief and has the potential to serve as president for three terms. His thoughts have even entered into the Constitution of the Chinese Communist Party. Xi's accumulation of power began to be juxtaposed with Mao's power who had a sacred position in society. Using constructivist approach, this paper attempts to analyze the role of non-material factor, such as the ideas of leader, in determining the direction of Chinese foreign policy. As the qualitative research, primary data obtained from the analysis of official government documents related to Xi Jinping's speech, the Chinese constitution, BRI, as well as official websites. Meanwhile, mass media news, scientific publications as well as other research reports consider as secondary data. It examines the practice of China's foreign policy is controlled and shaped by Xi Jinping's idea of China's rise. As a result, his ideas have played a role in changing the ways of diplomacy and the use of power that see BRI as China's global strategy, especially in China's relations with the US at the global level and cooperation with Southeast Asian and East Asian countries in order to streamline the BRI project.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memahami peran ide dan persepsi Xi Jinping tentang kebangkitan Tiongkok dalam *Belt and Road Initiative* (BRI). Inisiatif BRI yang dikemukakan Xi Jinping pada tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan ambisius yang diharapkan dapat terus mendorong kebangkitan Tiongkok. Xi Jinping sendiri memiliki posisi yang kuat dalam politik Tiongkok saat ini. Selain memimpin pemerintahan, Xi merupakan “commander-in-chief” militer dan berpotensi menjadi presiden dalam tiga periode. Pemikiran Xi bahkan telah masuk ke dalam konstitusi Partai Komunis Tiongkok. Akumulasi kekuasaan Xi mulai disandingkan dengan kekuasaan Mao yang memiliki posisi sakral di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivis, tulisan ini berupaya menganalisis peran hal-hal non-material, seperti ide dan pandangan seorang pemimpin, dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Melalui aplikasi metode kualitatif deskriptif, data primer diperoleh dari analisis dokumen-dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pidato Xi Jinping, konstitusi Tiongkok, BRI, maupun situs-situs resmi institusi atau organisasi internasional. Sementara, data sekunder berasal dari hasil telaah berita media massa, publikasi ilmiah yang terbit di jurnal bereputasi, maupun laporan penelitian lainnya. Tulisan ini berargumen bahwa praktek politik luar negeri Tiongkok dikontrol dan dibentuk oleh ide Xi Jinping mengenai kebangkitan Tiongkok. Hasilnya, ide Xi Jinping berperan dalam mengubah cara-cara diplomasi dan penggunaan kekuasaan yang melihat BRI sebagai strategi global Tiongkok, terutama dalam relasi Tiongkok dengan AS di tingkat global dan kerja sama terhadap negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur demi memuluskan proyek BRI.

Keywords

China's Rise, Foreign Policy, Global Strategy, Idea, Perception

Article History

Received January 22,

2022

Revised March 8, 2022

Accepted July 16, 2022

Published July 26, 2022

Corresponding Author

Arief Bakhtiar
Darmawan, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas
Jenderal Soedirman, Jl.
HR. Boenyamin no.
993, Purwokerto. 53122.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan pengaruh Tiongkok saat ini dalam lingkup global merupakan kebalikan dari posisi Tiongkok beberapa dekade silam. Sekitar 40-50 tahun lalu, Tiongkok menerapkan kebijakan yang tidak efisien, cenderung stagnan, dan terasing dari ekonomi global. Kebijakan Lompatan Hebat ke Depan untuk meningkatkan industri baja yang dimulai pada tahun 1958 menjadi kegagalan besar Mao. Sekitar 10 juta rakyat Tiongkok mati karena kelaparan dan kelelahan bekerja. Selain itu, Mao menggagas Revolusi Kebudayaan untuk mempertahankan ideologi sosialisme. Mao memburu dan membunuh lawan-lawan politik yang diduga akan mencederai ideologi sosialisme dengan cara mendorong kapitalisme. Dalam Revolusi Kebudayaan ini, diperkirakan 500 ribu sampai dua juta orang menjadi korban pembunuhan. Namun, semenjak Deng Xiaoping melakukan reformasi ekonomi, investasi, dan perdagangan internasional yang berorientasi pasar bebas pada tahun 1979, Tiongkok menjadi negara yang mengalami pertumbuhan pesat di dunia. Pada era Deng Xiaoping, meski masih menerapkan *low profile policy*, Tiongkok bersikap lebih terbuka terhadap hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat.

Dalam perkembangannya, Tiongkok yang dulu terlihat pasif dan defensif, mulai bersikap aktif dan berani berinisiatif (Darmawan, 2018). Pada tahun 2000, misalnya, Tiongkok berperan penting dalam kehadiran Korea Utara dalam ASEAN Regional Forum. Tiongkok juga membiayai pertemuan informal yang digagas Indonesia tentang isu LTS. Pada masa Xi Jinping, Tiongkok berusaha untuk lebih asertif dan agresif dalam politik luar negeri. Tiongkok mencanangkan *Belt and Road Initiative* (BRI). Tiongkok memperkenalkan visi 'Silk Road Economic Belt' dalam pidato Presiden Xi Jinping pada bulan September 2013 di Kazakhstan, dan mengenalkan visi 'the Maritime Silk Road' di depan parlemen Indonesia pada bulan Oktober 2013 (ASEAN-China Center Org, 2013). Pernyataan dari Xi Jinping tersebut baru diperkenalkan secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Tiongkok sekitar dua tahun kemudian, pada bulan Maret 2015, dengan penyebutan singkat "One Belt, One Road" (Aoyama, 2016).

Beberapa akademisi telah mengkaji BRI dari beragam perspektif. Di antara beragam perspektif tersebut, sangat minim kajian-kajian yang mengaitkan BRI dengan ide pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Penelitian Yandry Kurniawan mengkaji BRI dalam perspektif liberal, dengan melihat BRI sebagai mekanisme multilateral pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di berbagai sektor dan penjuru global (Kurniawan, 2016). Sementara itu, penelitian Peter Cai mengkaji dalam perspektif realis dengan memandang bahwa BRI sebenarnya memiliki lebih banyak pertimbangan domestik, seperti strategi ekspor produk pabrik daripada membuang surplus produk yang ada (Cai, 2017). Kajian realis lain, John Wuthnow, mendekati BRI dengan memaparkan ancaman-ancaman jangka panjang dan bagaimana Tiongkok bisa mengatasi ancaman tersebut melalui strategi militer, intelijen, diplomasi, serta ekonomi (Wuthnow, 2017). Dalam pandangan tersebut, BRI dilihat sebagai respon Tiongkok atas kebijakan Obama yang kembali mempertimbangkan Asia dalam politik luar negeri. Salah satu kajian lain mengenai BRI adalah tulisan Korwa, yang mencoba menggunakan konsep filosofis Tiongkok, "semua di bawah langit" atau *tianxia* (Korwa, 2019). Penelitian-penelitian di atas mengaitkan BRI dengan Tiongkok dan kurang menyinggung Xi Jinping merupakan sosok sentral di balik ambisi kebangkitan Tiongkok.

Dalam beberapa tahun terakhir, Xi Jinping telah melakukan akumulasi kekuasaan yang besar (X. Li & Wang, 2015). menyebut Xi sebagai seseorang yang strategis dan taktikal. Media-media asing menyebut Xi Jinping sebagai orang terkuat di Tiongkok (BBC, 2017; CBC, 2017;

Philips, 2017; Shankaran, 2020). Hal itu tidak lepas dari kejadian pada bulan Oktober 2017, yang mana Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok memasukkan doktrin “*Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era*” ke dalam konstitusi. Lebih jauh lagi, pada tahun 2018, Tiongkok menghapus batas presidensial dua periode, sehingga Xi Jinping bisa menjadi presiden lebih lama. Partai menyebut bahwa Xi Jinping membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memastikan reformasi ekonomi (Associated Press, 2021). Dengan menganalisis kebijakan BRI, tulisan ini berupaya untuk menjawab bagaimana persepsi dan ide Xi Jinping mengenai kebangkitan Tiongkok dan kebijakan luar negeri. Tulisan ini berasumsi bahwa praktek politik luar negeri Tiongkok dikontrol dan dibentuk oleh ide Xi Jinping, dan hal itu mengubah cara-cara diplomasi dan penggunaan kekuasaan Tiongkok yang melihat BRI sebagai strategi global Tiongkok.

Konstruktivisme: Memahami Landasan Intersubjektif Pembuat Kebijakan

Memahami peran atau pengaruh seorang pemimpin merupakan bentuk dari level analisis individu dalam hubungan internasional. Level analisis individu menggunakan pendekatan aktor tertentu yang lebih spesifik dalam hubungan internasional, berdasarkan asumsi bahwa pengambilan keputusan dalam setiap interaksi dan tindakan negara adalah individu atau kelompok tertentu, seperti presiden, perdana menteri, atau aktor spesifik lainnya. Dalam menggunakan level analisis individu, peneliti menggunakan berbagai macam perspektif, baik menggunakan perspektif realis yang menekankan pada rasionalitas aktor (Nye, 2019), perspektif kognitif yang menekankan karakteristik atau personalitas pemimpin (Hussain & Shakoor, 2017; Preston, 2010), maupun konstruktivisme yang menyertakan unsur-unsur non-material dalam pilihan tindakan aktor. Dari beragam cara analisis tersebut, penelitian ini menggunakan konstruktivisme sebagai kerangka analisis.

Konstruktivisme memandang fenomena hubungan internasional dengan tidak terpaku pada faktor kepentingan saja. Menurut Friedrich Kratochwil, pada dasarnya konstruktivisme melihat hubungan antarnegara dalam komunitas internasional dari beberapa unsur seperti proses pembelajaran, interaksi antarsubjek yang dibentuk oleh identitas, nilai-nilai, kepentingan dan intensi atau maksud yang kemudian membentuk pola hubungan antara teman atau musuh. Secara sederhana, konstruktivisme melihat dunia sebagai konstruksi sosial. Konstruktivis cenderung melihat proses sosialisasi dan pembelajaran dari norma, nilai, dan prinsip yang dialami oleh aktor yang berlaku di lingkungan serta budaya sekitarnya dan kemudian diterapkan sebagai kebijakan suatu negara (Hadiwinata, 2017; Theys, 2017).

Konstruktivis memperhatikan faktor linguistik dalam membentuk persepsi hubungan antaraktor yang dapat membentuk pola hubungan “pertemanan” atau “permusuhan”. Seperti komunikasi simbolik atau bahasa yang mengandung kepentingan, intensi dan identitas merupakan “bahan mentah” yang mengandung otentisitas dan originalitas tinggi. Dalam prakteknya, “bahan mentah” dapat dilihat dari pernyataan para agen. Sedangkan fakta-fakta yang tetap merupakan “bahan jadi” yang telah mengalami penyederhanaan dengan menghilangkan bagian-bagian yang absurd dan tidak masuk akal. Dalam prakteknya, “bahan jadi merupakan dokumen resmi suatu negara/ lembaga seperti kebijakan, peraturan, perjanjian, dan lain-lain (Hadiwinata, 2017).

Aspek penting selanjutnya dalam konstruktivisme adalah alasan dan penyebab. Konstruktivisme sering mendasarkan analisisnya pada kausalitas (sebab-akibat) atau menitikberatkan pada pertanyaan seperti “apa yang menyebabkan aktor bertindak”. Sekilas

tampak bahwa kausalitas dalam teori konstruktivis hanya menyangkut pemilihan istilah yang dimaksudkan untuk menggantikan kata alasan yang memotivasi aktor untuk melakukan tindakan tertentu atau menemukan hubungan antara aktor, norma, dan identitas. Namun, pada kenyataannya persoalannya tidak sesederhana itu karena terdapat beda yang signifikan antara penyebab yang dilandasi oleh logika dan hukum-hukum tertentu dengan alasan yang menyangkut intensi subjektif. Sederhananya, analisis konstruktivis hanya perlu menunjukkan alasan dan intensi/ maksud dari para aktor dalam melakukan tindakan tertentu terlepas dari istilah yang mereka pakai (Hadiwinata, 2017; Theys, 2017).

Dalam penelitian ini, analisis konstruksi ide Xi Jinping dalam BRI perlu menunjukkan alasan dan intensi dari Xi Jinping dalam membuat visi kebijakan tersebut, yang dianalisis melalui dasar-dasar konstruktivisme seperti nilai-nilai, norma, sejarah, identitas, serta proses sosialisasi yang dialami oleh Xi Jinping dan Tiongkok. Hal itu tidak ada pada perspektif realisme dan liberalisme yang hanya menekankan pada faktor-faktor material pada kekuatan militer dan ekonomi. Xi Jinping mempunyai peran penting dalam mengonstruksi ide personalnya terhadap identitas, nilai-nilai dan sejarah Tiongkok sehingga menjadi sebuah kebijakan negara atau dalam konteks ini adalah BRI. Pada masa Xi Jinping, Tiongkok berusaha untuk lebih asertif dan agresif dalam politik luar negeri. Konstruktivisme mengamati bahwa ide personal pemimpin bisa menjelma menjadi politik luar negeri. Dalam konteks Tiongkok, ide Xi Jinping memiliki kaitan erat dengan model Kepemimpinan Terpusat Partai Komunis. Sehingga, tulisan ini bertujuan untuk memahami peran ide dan persepsi Xi Jinping tentang kebangkitan Tiongkok dalam Belt and Road Initiative (BRI).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan pada prosedur atau teknik pengumpulan data yang berdasar pada penggunaan kata atau data-data non-numerik (Lamont & Boduszynski, 2020). Teknik pengumpulan data disandarkan pada studi literatur dengan menyeleksi publikasi penelitian, laporan pemerintah, dan sumber media internet yang menulis topik Xi Jinping, kebangkitan Tiongkok, dan BRI. Data primer diperoleh dari analisis dokumen-dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pidato Xi Jinping, konstitusi Tiongkok, BRI, maupun situs-situs resmi institusi atau organisasi internasional. Sementara, data sekunder berasal dari hasil telaah berita media massa, publikasi ilmiah yang terbit di jurnal bereputasi, maupun laporan penelitian lainnya.

Validasi data merujuk pada kerangka berpikir konstruktivisme dalam memahami peran ide dan persepsi Xi Jinping tentang kebangkitan Tiongkok melalui BRI. Sehingga penyimpulan penelitian membahas tiga poin utama; (1) persona, ide, dan persepsi Xi Jinping mengenai kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global, (2) program BRI yang meliputi progres, tantangan, dan hambatan yang menyertainya, dan (3) proyek BRI sebagai implementasi ide dan persepsi Xi Jinping.

Persona Xi Jinping dan Ide mengenai Kebangkitan Tiongkok

Xi Jinping memiliki profil yang mendukung dirinya dalam menempuh karir politik. Xi adalah anak dari mantan wakil perdana menteri Xi Zhongxun yang berjuang bersama Mao saat perang sipil berlangsung. Ketika akhirnya Xi Zhongxun dituduh sebagai musuh revolusi dan keluarganya hancur, Xi kemudian turut serta dalam program re-edukasi di desa pelosok yang

dicanangkan Mao untuk para pemuda. Beberapa tahun kemudian, Xi menggunakan sejarah hidupnya untuk mendapatkan “validasi politik” dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki pengalaman politik sampai pada level yang terbawah. Pada tahun 1973, Xi mencoba bergabung dengan Partai Komunis, meskipun harus mengalami sepuluh kali percobaan sampai diterima pada tahun 1974. Pada tahun 1975, Xi diterima kuliah di Tsinghua University, salah satu universitas ternama di Tiongkok. Setelah lulus kuliah, 1979, Xi menjadi sekretaris mantan menteri pertahanan Geng Biao di Komisi Militer Pusat. Di sanalah dia mendapatkan pengalaman dan pengetahuan soal militer. Setelah melalui berbagai posisi, Xi menjadi pemimpin partai di Provinsi Zhejiang selama 2002-2007. Prestasi Xi membuat para elit politik mulai mempertimbangkan dirinya. Ketika elit Partai Komunis di Shanghai, Chen Liangyu, terlibat skandal korupsi besar pada tahun 2006, Xi Jinping terpilih untuk menggantikan sebagai senior partai (Brown, 2018). Ini merupakan langkah besar dalam sejarah politik Xi.

Pada akhir tahun 2007, Xi Jinping terpilih menjadi satu dari tujuh anggota elit Politbiro, posisi puncak partai yang hanya berada di bawah sekjen Partai Komunis. Di dalam tubuh partai saat itu, Xi Jinping dan Li Keqiang merupakan kader favorit yang akan menggantikan Hu Jintao. Ketika akhirnya Xi Jinping terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Hu Jintao, maka cukup jelas bahwa Xi adalah calon pemimpin Tiongkok selanjutnya (sementara Li Keqiang menjadi Perdana Menteri dua periode, 2013-2018 dan 2019-2023). Pada bulan November 2012, Xi Jinping diangkat menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok. Tidak lama setelah itu, Xi Jinping terpilih menjadi presiden Tiongkok. Dalam kunjungan luar negeri setelah diangkat menjadi presiden, Xi Jinping melontarkan ide mengenai “One Belt, One Road”.

Perjalanan karir politik di atas membentuk Xi Jinping sebagai politisi yang tangguh dan agresif dalam meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Strategi Xi Jinping untuk mempertahankan kekuasaan ditunjukkan oleh perubahan yang terjadi pada organisasi militer, organisasi partai, dan organisasi pemerintah. Dalam organisasi militer, pada bulan April 2016, Presiden Xi Jinping mengejutkan publik ketika melakukan kunjungan formal ke pusat komando Komisi Militer Pusat, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Militer Pusat. Xi Jinping menyampaikan bahwa organisasi militer dan personil militer Tiongkok harus loyal kepada Partai Komunis. Namun, ada dua hal yang menjadi sorotan. Pertama, saat itu Xi Jinping menghadiri acara dengan memakai seragam kamuflase khas militer. Kedua, Xi Jinping dan media dalam negeri Tiongkok secara konsisten memberi gelar “commander-in-chief” dari *People’s Liberation Army* (PLA) kepada Xi Jinping. Dua kejadian tersebut belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Menurut James Mulvenon, dua fakta penting itu menunjukkan bahwa Xi Jinping berupaya membangun otoritas personal terhadap organisasi militer (Mulvenon, 2017). Menurut tulisan ini lain, Kerry Brown, tindakan itu merupakan pesan yang tegas bahwa kekuasaan berada di tangan sipil, bukan militer (Brown, 2018).

Dalam struktur pemerintahan Tiongkok, seorang presiden biasanya juga menjadi sekretaris jenderal selaku pimpinan tertinggi partai. Komisi Militer Pusat Negara dan Komisi Militer Pusat Partai berada pada struktur yang setara, dengan sama-sama membawahi angkatan militer (*People’s Liberation Army* atau PLA) dan kesatuan polisi (*People’s Armed Police* atau PAP). Bisa dikatakan, PLA merupakan angkatan bersenjata Partai Komunis Tiongkok. Tidak heran jika dalam kunjungannya ke markas militer, Xi menegaskan keharusan anggota militer untuk loyal kepada partai (Mulvenon, 2017). Di antara struktur tersebut, Xi Jinping memegang tiga jabatan strategis

sekaligus, yaitu sebagai presiden Tiongkok, sekretaris jenderal Partai Komunis, dan kepala Komisi Militer Pusat Partai Komunis.

Kesatuan struktur antara Partai Komunis dan pemerintah Tiongkok sepertinya akan semakin terakumulasi pada sosok tunggal Xi Jinping. Dalam struktur pemerintahan, Xi Jinping telah menjadi presiden Tiongkok selama dua periode, dan tampaknya akan bertahan lebih lama lagi sebagai pemimpin dan pemegang kebijakan utama. Dalam struktur kepartaian, jabatan sekjen partai dan kepala komisi militer nampaknya akan mengikuti periode kepemimpinan Xi. Pemikiran Xi juga telah dimasukkan ke dalam konstitusi partai. Pada tahun 2017, dalam Kongres Komite Pusat ke-19, Xi dilaporkan mengadakan wawancara secara personal untuk memilih anggota baru Politbiro dan Komite Tetap Partai Komunis. Hal ini berbeda dengan dua kongres sebelumnya, yang mana Partai menerapkan *straw poll* dengan mempersilakan sekelompok pimpinan partai untuk mengajukan kandidat. Meski belum jelas pengaruhnya dalam keterpilihan kandidat, sistem demokrasi di dalam internal partai tersebut sangat berguna untuk menilai legitimasi kandidat atau anggota partai terpilih (Xiangwei, 2017). Dengan perubahan metode pemilihan kandidat elit di tubuh Partai, Xi telah menjadi orang terkuat di pemerintahan dan partai. Dengan demikian, para politisi di lingkaran kekuasaan atau lawan politik Xi tidak akan secara gegabah melakukan tindakan yang berpotensi dianggap melawan kekuasaan Xi.

Pada Oktober 2017 Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 sepakat memasukkan doktrin politik baru “*Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era*” ke dalam konstitusi partai,

“The Congress holds that statements on our people-centred philosophy of development; on innovative, coordinated, green, and open development that is for everyone; on coordinated efforts to finish building a moderately prosperous society in all respects, comprehensively deepen reform, fully advance law-based governance, and strengthen Party self-governance in every respect; and on all-out efforts to build a great modern socialist country, represent the ultimate purpose, vision, overall strategy, and overarching goal of the Party in upholding and developing socialism with Chinese characteristics.” (Yamei, 2017)

Pemikiran Xi Jinping meliputi delapan isu fundamental dan 14 prinsip utama yang menjadi pedoman bagi Partai Komunis untuk mewujudkannya. Doktrin tersebut, diantaranya menegaskan bahwa Partai berupaya untuk menjalankan dan mengembangkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok disertai semangat modernisasi sosialis dan kebangkitan nasional. Karakteristik Tiongkok yang dimaksud adalah menjalankan ekonomi pasar untuk bisa bersaing dengan kemajuan global, dengan tetap berakar pada sistem sosialis dan sistem pemerintahan Tiongkok saat ini. Doktrin tersebut menggarisbawahi pentingnya membangun kepercayaan diri yang lebih kuat terhadap arah, teori, sistem, dan kultur sosialisme dengan karakteristik Tiongkok (Bo, 2018)

Xi Jinping menargetkan bahwa pada tahun 2049, Tiongkok telah menjadi negara sosialis modern yang sejahtera. Untuk menjadi negara modern, Tiongkok membangun laboratorium-laboratorium dan pusat-pusat inovasi saintifik. Dalam hal kesejahteraan, Tiongkok yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan menghasilkan beberapa pengusaha terkaya di dunia harus mengatasi kesenjangan penghasilan di dalam negeri. Dalam sejarah Tiongkok, hanya pemikiran Mao Zedong dan Deng Xiaoping yang pernah masuk dalam konstitusi partai (Tsang, 2019). Untuk Deng Xiaoping, pemikirannya bahkan dimasukkan ke dalam konstitusi setelah kematiannya.

Artinya, kepercayaan Partai terhadap Xi Jinping hanya bisa dibandingkan dengan pengkultusan terhadap Mao, yang pemikirannya masuk ke dalam konstitusi partai.

Lima bulan kemudian, jalan kekuasaan Xi Jinping semakin lapang. Dalam organisasi pemerintahan, pada bulan Maret 2018, Kongres Rakyat Nasional menghapus konstitusi yang membatasi jabatan presidensial dua periode, baik untuk presiden dan wakil presiden. Dengan penghapusan tersebut, Xi Jinping bisa terus bertahan di puncak kekuasaan Tiongkok setelah periode jabatan kedua berakhir tahun 2023 nanti, minimal sampai 2027. Penghapusan pembatasan kekuasaan presidensial awalnya diinisiasi oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping memutuskan menerima sistem Barat tentang sistem pengawasan dan keseimbangan dengan beberapa penyesuaian untuk mencegah adanya kepemimpinan diktator seperti Mao Zedong (Bader, 2018). Deng Xiaoping khawatir bahwa kepemimpinan diktator memunculkan kerusuhan di masyarakat. Terbukti, sejak tahun 1989, pergantian kepemimpinan di Tiongkok berjalan cukup baik tanpa adanya kerusuhan di masyarakat. Ada keteraturan dan prediktabilitas dalam proses pergantian kepemimpinan. Dengan pergantian aturan presidensial tersebut, transisi kekuasaan Tiongkok ke depan menjadi tak menentu.

Tabel 1. Perjalanan dan Manuver Politik Xi Jinping

Tahun	Manuver Politik Strategis
2002	Terpilih sebagai pemimpin Partai Komunis di Provinsi Zhejiang
2006	Terpilih sebagai pemimpin Partai Komunis di Shanghai
2007	Terpilih sebagai anggota elit Politbiro
2008	Terpilih sebagai wakil presiden Tiongkok (2008-2013)
2012	Terpilih sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis
2012	Pertama kali memperkenalkan “ <i>the China Dream</i> ”
2013	Terpilih sebagai presiden Tiongkok Periode I (2013-2018)
2013	Pertama kali memperkenalkan visi ‘ <i>Silk Road Economic Belt</i> ’ dan ‘ <i>the Maritime Silk Road</i> ’, yang kemudian disebut BRI
2016	Penyematan gelar “ <i>commander-in-chief</i> ” dari PLA
2017	Memasukkan doktrin “ <i>Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era</i> ” ke dalam konstitusi partai
2018	Terpilih sebagai presiden Tiongkok Periode II (2018-2023)

Tabel 1 menunjukkan analisis perjalanan dan manuver politik yang membentuk kepemimpinan Xi Jinping. Melalui manuver politik dan akumulasi kekuasaannya, Xi Jinping menjadi salah satu pemimpin terkuat di dunia. Perlawanan terhadap Xi Jinping akan dianggap sebagai perlawanan terhadap partai (BBC, 2017). Bersama kekuasaan yang besar itu, Xi Jinping turut membawa ide mengenai kebangkitan Tiongkok. Melalui perspektif konstruktivis, tulisan ini mengamati bahwa ide kebangkitan Tiongkok berasal dari proses konstruksi dan sosialisasi masyarakat terhadap sejarah masa lalu. Konstruksi dan sosialisasi ini diturunkan dari generasi ke generasi, sampai mengarah pada pembentukan identitas sosialisme yang solid dengan karakteristik Tiongkok, nilai-nilai kebanggaan terhadap kejayaan peradaban masa lalu, serta intensi untuk menjadi negara besar dan maju sebagaimana negara-negara Barat. Proses inilah yang juga masuk ke dalam diri Xi Jinping.

Pada tanggal 29 November 2012, Xi Jinping pertama kali berpidato mengenai *China Dream* (*Zhongguo Meng*) saat mengunjungi Museum Nasional Tiongkok bersama seluruh anggota Politbiro (Wang, 2014),

“Everyone has an ideal, ambition and dream. We are now all talking about the Chinese Dream. In my opinion, achieving the rejuvenation of the Chinese nation has been the greatest dream of the Chinese people since the advent of modern times. This dream embodies the long-cherished hope of several generations of the Chinese people, gives expression to the overall interests of the Chinese nation and the Chinese people, and represents the shared aspiration of all the sons and daughters of the Chinese nation...” (Jinping, 2012a).

Ide “*the Chinese Dream*” atau sering disebut juga *China Dream* yang ditawarkan oleh Xi ini didasarkan pada trauma sejarah dan mitos kejayaan masa lalu (Wang, 2014).

Berdasarkan pidato Xi, trauma sejarah mengacu pada seabad penderitaan yang dimulai ketika Perang Opium Pertama tahun 1839-1942 sampai akhir Perang Sino-Jepang tahun 1945. Kekalahan Tiongkok dan penderitaan yang ditimbulkan dari kekalahan itu merupakan pengalaman penting yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi melalui interaksi masyarakat. Pengalaman seabad penderitaan merupakan simbol ancaman dan ketakutan terdalam bangsa Tiongkok yang juga mewarnai pembentukan identitas generasi Tiongkok masa kini. Lebih jauh, mitos kejayaan masa lalu sebelum tahun 1840. Bangsa Tiongkok percaya bahwa Tiongkok merupakan peradaban besar di masa lalu dan merupakan pusat dunia. Sebagai bagian dari kejayaan *Central Kingdom*, bangsa Tiongkok merasa memiliki kebanggaan sejarah dan budaya tersendiri.

China Dream memaknai Tiongkok sebagai peradaban besar di masa lalu, sebelum akhirnya takluk dan menderita di bawah ancaman kekuatan Barat dan Jepang. Setelah mengalami seabad penderitaan, inilah saatnya Tiongkok membangun tekad untuk membangkitkan kejayaan dan kekuatan masa lalu. *China Dream* meliputi impian terhadap situasi ideal dalam hal kekuatan negara (ekonomi, politik, diplomasi, militer, sains), peradaban (keadilan, kekayaan budaya, ketinggian moral), harmoni sosial (keserasian antarkelas masyarakat), dan keindahan (peduli lingkungan dan rendah polusi) (Sinaga, 2020). Dari komponen-komponen tersebut, Xi Jinping membawa frase kebangkitan Tiongkok secara lebih praktikal, yaitu menyesuaikan aspirasi masyarakat Tiongkok dalam keseharian, terutama kelas menengah, untuk bisa hidup seperti masyarakat di negara maju. Ide Xi membawa serta impian masyarakat Tiongkok untuk memiliki rumah dan kendaraan yang bagus, menempuh pendidikan yang berkualitas, tinggal di kota yang maju, serta hidup di lingkungan yang bebas dari polusi. Setelah pertama kali memperkenalkan frase “*the Chinese Dream*” pada tahun 2012, Xi kembali menegaskan cita-cita itu pada peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis di Lapangan Tiananmen (NikkeiAsia, 2021). Meskipun terkesan utopis, langkah Xi Jinping menyatakan mimpi-mimpinya tentang Tiongkok, situasi-situasi ideal yang diharapkan, beserta masa depan yang indah untuk seluruh rakyat, merupakan langkah yang berani.

Inisiatif, Perkembangan, dan Progres Belt and Road Initiative

Pada bagian sebelumnya, tulisan ini memaparkan tentang narasi kebangkitan yang menjadi sumber penting bagi pemimpin politik Tiongkok untuk menggerakkan massa. Ide kebangkitan Tiongkok bukan hal baru yang diangkat pada masa Xi Jinping (Wang, 2014). Pada tahun 1990-an, Partai Komunis Tiongkok menggunakan frase kebangkitan bangsa Tiongkok (*zhonghua minzu de weida fuxing*) sebagai misi baru partai. Di sini, misi partai bergeser dari fokus realisasi komunisme

kepada fokus tujuan nasional berdasarkan kejayaan masa lalu. Hu Jintao juga sering mengakhiri pidatonya agar masyarakat Tiongkok bekerja keras demi kebangkitan bangsa Tiongkok. Pidato Hu Jintao pada kongres partai ke-17 pada bulan November 2007 bahkan diberi judul “*General Guidelines for the Great Rejuvenation of the Chinese Nation*”. Namun, berbeda dari para pendahulunya, Xi Jinping berusaha menyematkan ide kebangkitan Tiongkok dengan proyek berskala global “*One Belt, One Road*”.

Penamaan resmi dari “*One Belt, One Road*” adalah “*Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road Development Strategy*”. Istilah “*One Belt, One Road*” adalah terjemahan harfiah dari bahasa Mandarin, yaitu “一带一路”. Strategi yang lebih rinci mengenai “*One Belt, One Road*” baru dirilis pada bulan Mei 2015, ketika pemerintah memaparkan enam koridor ekonomi internasional (Aoyama, 2016). Media-media asing lebih sering menyebut proyek tersebut dengan nama *Belt and Road Initiative* (BRI). Tiongkok sendiri cukup terbuka dengan pemakaian kata “*initiative*” karena kata “*one*” dan “*strategy*” memang bisa menimbulkan tafsir agresif terhadap tujuan BRI, yang berpotensi membuat negara lain tidak nyaman. Untuk mencegah kesalahan persepsi, maka istilah OBOR diubah berdasarkan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Tiongkok Fu Ying dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Saat ini, istilah yang digunakan adalah BRI. BRI diperkirakan melibatkan 64 negara, 4,4 miliar manusia, dan transaksi ekonomi hingga \$21 triliun.

Strategi global Tiongkok melalui BRI tidak muncul begitu saja. Sejak awal pemerintahan Xi Jinping, kebangkitan kembali bangsa Tiongkok menjadi frase yang terus muncul dalam setiap kesempatan. Xi Jinping menyempurnakannya ke dalam sebuah proyek global BRI yang merepresentasikan kebesaran Tiongkok. Tiongkok yang selama ini bergantung pada legitimasi ideologi Marxisme-Leninisme dan Maoisme untuk menjaga tatanan dan stabilitas merasa perlu untuk memiliki luaran legitimasi lain (Mühlhahn, 2019). Pemerintah pun tidak lagi hanya fokus pada komunisme sebagai tujuan, melainkan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kebesaran Tiongkok sebagai sebuah bangsa. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat menjadi lebih penting daripada ideologi politik dalam melegitimasi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama dua dekade terakhir bukannya tanpa prediksi masa depan yang mengkhawatirkan. Diperkirakan pada tahun 2050-an, Tiongkok akan memiliki 25% generasi berusia 65 tahun ke atas. Para pengamat memprediksi kekhawatiran bahwa Tiongkok mungkin “menjadi tua sebelum kaya” (Chu, 2017). Dengan alasan tersebut, tidak mengherankan jika Tiongkok sangat ambisius terhadap BRI, terutama sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan legitimasinya. Dengan BRI, Tiongkok semakin memperkuat kerja sama ekonomi dengan Asia, Timur Tengah, dan Eropa karena negara-negara tersebut termasuk pangsa pasar potensial (J. Li et al., 2021). Secara lebih rinci, sasaran Tiongkok terutama kawasan Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Tiongkok juga ikut bergabung dengan sidang-sidang forum regional, salah satu contohnya pada terdapat forum kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur bernama ‘17+1’ (Garlick, 2020). Pertemuan regional lain juga turut diselenggarakan oleh negara-negara Arab dan Tiongkok, yaitu *China-Arab State Cooperation Forum* (CASCF). Dengan mengamati pola interaksi kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok, target utama jalur sutra BRI adalah negara-negara Dunia Ketiga atau negara berkembang, yang pada akhirnya berujung pada negara-negara Eropa. Hal ini bertujuan untuk meredakan intensitas ketegangan hubungan ekonomi politik antara dua kekuatan ekonomi utama (AS-Tiongkok) yang bisa menimbulkan efek negatif bagi kerja sama multilateral (Y. Li, 2017).

BRI memiliki potensi yang besar bagi peningkatan investasi Tiongkok. BRI bisa memperkuat infrastruktur dengan jalan-jalan dan jalur kereta api baru, memperkuat relasi dengan persetujuan perdagangan dan transportasi baru, sekaligus ikatan kultural dengan beasiswa universitas dan pertukaran antarmasyarakat yang lain (Hillman, 2018). Atensi global terhadap BRI, menurut media Tiongkok, terus meningkat. Pada BRF yang diselenggarakan pada bulan Mei 2017, 30 pemimpin dunia dan beberapa perwakilan dari 30 negara lain hadir dalam dua hari pertemuan (Tiezzi, 2017). Komunike BRI sepakat untuk berkomitmen “*to build open economy, ensure free and inclusive trade, oppose all forms of protectionism including in the framework of the Belt and Road Initiative*”. Xi Jinping dalam pidatonya menggaribawahi tiga area fokus BRI ke depan, yaitu pembangunan industrial, integrasi dan reformasi finansial, serta pembangunan infrastruktur.

Untuk menyokong dana BRI bagi negara-negara mitra, pemerintah Tiongkok telah mendirikan *Asian Investment International Bank* (AIIB). Selain itu, masih terdapat pihak-pihak lainnya yang menyumbangkan dana besar untuk BRI yakni *China Development Bank* (CDB) dan *Exim Bank of China*, dengan dukungan dari bank milik negara lainnya seperti *Bank of China* dan *Industrial and Commercial Bank of China* (ICBC) (He, 2020). Belum lagi investasi dari aliansi Tiongkok yang mencakup Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan melalui *New Development Bank* (NDB) dengan perkiraan telah terkumpul modal awal sebesar US\$50 miliar (Week In China, 2016). Pada saat *BRI Summit*, Presiden Xi mengemukakan bahwa Tiongkok akan menambah US\$14,5 miliar untuk pendanaan proyek-proyek BRI dengan mulai memberikan US\$8.7 miliar untuk negara-negara berkembang. Menurut Bank Dunia, BRI membutuhkan anggaran sebesar US\$500 miliar. BRI sudah memiliki 107 proyek di 139 negara dan memiliki nilai proyek sebesar US\$73.33 miliar hingga kuartal ketiga 2020 (Lee, 2020).

Berdasarkan kontribusi BRI bagi perekonomian negara, perusahaan-perusahaan besar Tiongkok tumbuh pesat, terutama yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur. Pada tahun 2017, majalah Fortune merilis 500 perusahaan/ firma terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut, 107 perusahaan Tiongkok masuk daftar, dengan 75 diantaranya perusahaan milik negara. Di tahun yang sama, tujuh dari sepuluh perusahaan konstruksi terbesar di dunia dari segi pendapatan berasal dari Tiongkok. Pada tahun 2020 dan 2021, perusahaan/ firma Tiongkok naik menjadi 134 perusahaan dari 500 perusahaan (Fortune, 2021). Ketika mengajukan proyek kerja sama dalam payung BRI, Tiongkok telah memiliki modal ini. Proyek infrastruktur BRI turut membantu meningkatkan besaran ekspor barang dan jasa yang terkait bidang konstruksi. Secara politik, Tiongkok telah mendapatkan keuntungan, baik dalam lingkup relasi antarnegara maupun dalam lingkup global. Relasi dengan Pakistan, misalnya, membuat hubungan kedua negara menjadi lebih erat. Pinjaman Tiongkok juga membuat negara seperti Filipina dan Kamboja untuk melakukan re-evaluasi hubungan diplomasi dan militer dengan AS (Hillman, 2018). Tidak bisa dipungkiri, dalam lingkup global, Tiongkok telah dianggap sebagai negara yang unggul dalam memanfaatkan globalisasi.

Namun, impresi dan harapan yang tinggi mengenai BRI tidak lepas dari berbagai kekhawatiran. Beberapa kekhawatiran tersebut terutama muncul dari sisi negara tujuan investasi BRI, seperti kurangnya partisipasi pekerja lokal, hutang yang terus membesar, proyek-proyek yang tertunda, serta pengaruh terhadap kedaulatan suatu negara (Yamada & Palma, 2018). Negara-negara yang terlilit hutang Tiongkok untuk proyek pembangunan diantaranya adalah Pakistan, Maladewa, Laos, dan Sri Lanka. Tiongkok bahkan disebut tengah menggunakan diplomasi jebakan

utang yang berpotensi meningkatkan kesadaran negara-negara lain untuk berhati-hati terhadap proyek-proyek BRI (Dollar, 2020; Shepard, 2020). Kekhawatiran tersebut berimbas pada investasi luar negeri Tiongkok yang turun dan berada di kisaran US\$ 20-30 miliar pada 2017-2021, setelah pada tahun 2016 mencatat angka sebesar US\$ 50-60 miliar (CEIC, 2021; Moodys, 2019).

Saat ini, keberadaan pandemi Covid-19 berimbas ke pada penurunan investasi terhadap investasi untuk berbagai proyek BRI. Menurut *China Global Investment Tracker*, investasi untuk BRI hanya mendapatkan sekitar lebih dari US\$ 25 miliar pada kuartar pertama tahun 2020, turun dari US\$ 126 miliar dari tahun 2019 (Asia News, 2020). Sepanjang 2020, investasi ke negara-negara yang menjalin kerja sama BRI sebesar US\$ 47 miliar saja, atau turun drastis sekitar 54% dari investasi tahun 2019 (Nedopil, 2020). Akibatnya, proyek-proyek BRI di Asia dan Afrika banyak yang terhenti sementara karena buruknya tren investasi.

BRI sebagai Implementasi Ide Xi Jinping

Dengan menggunakan analisis konstruktivisme, ide Xi Jinping terwujud dalam kebijakan luar negeri BRI melalui dua karakteristik. Pertama, konstruktivisme melihat ide dan persepsi Xi sebagai dasar atau pendorong karakteristik polugri Tiongkok. Persepsi itu tidak ada intersubjektivitas sosial karena posisi Xi Jinping dan model Kepemimpinan Terpusat di pemerintahan Tiongkok. Kedua, ada relasi yang erat antara cara pandang Xi terhadap Tiongkok dengan performa perubahan yang terjadi pada kebijakan luar negeri.

Mengenai analisis pertama, ide atau Pemikiran Xi Jinping konsisten dalam politik luar negeri secara karakteristik: hibriditas. Ide Xi bisa disebut dengan hibrid karena berupaya menyatukan antara tradisi dan modernitas (Brown, 2018). Pemikiran Xi tidak bisa lepas dari Marxisme dan sejarah Tiongkok yang membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat Tiongkok saat ini, sekaligus pada saat yang bersamaan memiliki tujuan dan luaran yang praktikal. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Xi menggagas proyek global BRI dan meskipun mendapatkan tantangan yang besar, Tiongkok sepertinya tidak akan menyerah begitu saja dalam waktu dekat. BRI dipandang sebagai salah satu jalan penting menuju proses modernisasi sosialis. Xi menetapkan target bahwa setelah berhasil melakukan modernisasi sosialis, Tiongkok akan menjadi negara sosialis modern terbesar di dunia pada tahun 1950.

Ide Xi di atas menyatu dengan fakta bahwa Tiongkok merupakan negara yang menerapkan sistem satu partai. Semenjak satu abad yang lalu, tahun 1921, Partai Komunis Tiongkok merupakan pendiri dan penyokong utama negara Tiongkok modern. Setelah memenangi perang sipil dari partai nasionalis Kuomintang pada tahun 1949, Partai Komunis menjadi penguasa tunggal di Tiongkok. Struktur partai dan pemerintahan Tiongkok memiliki kesatuan yang terpadu, seperti yang telah dipaparkan oleh tulisan ini. Di sinilah letak kepemimpinan terpusat ala Xi Jinping. Xi Jinping melakukan tindakan-tindakan politik untuk mengkonsolidasi peran Partai dalam mewujudkan misi nasional menjadikan Tiongkok sebagai bangsa yang besar. Hal ini berbeda dengan Hu Jintao yang fokus pada pertumbuhan GDP dan meningkatkan hasil kemajuan ekonomi (Brown, 2018). Partai Komunis memiliki peran utama dan integral dalam strategi kepemimpinan Xi Jinping. Persetujuan bersama para elit Partai Komunis Tiongkok untuk memuluskan jalan kekuasaan Xi menunjukkan komitmen mereka terhadap ide *China Dream* dan mempromosikan inisiatif Xi yang dikenal dengan “One Belt, One Road” atau BRI (CBC, 2017).

Pemikiran Xi Jinping yang masuk di dalam konstitusi Partai Komunis juga memiliki peran yang esensial. Di negara yang sangat besar dan kompleks seperti Tiongkok, tidak mudah untuk memenangkan satu ide di atas ide-ide lainnya. Ketika satu ide disetujui oleh Partai Komunis, ide tersebut pasti telah berhasil dipertahankan dari kritik selama bertahun-tahun (Brown, 2018). Dengan dimasukkannya *Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era* dalam konstitusi, hal itu menandakan bahwa Partai Komunis memiliki satu bahasa dan tujuan yang sama. Bagi Xi sendiri, ide memiliki fungsi yang sangat vital. Ide merupakan alat untuk mempersatukan partai serta menyatukan tujuan dan identitas sekitar 88 juta anggota Partai Komunis.

Tabel 2. Adopsi Pemikiran/ Ideologi/ Pandangan dalam Konstitusi Partai Komunis Tiongkok

Pemikiran/ Teori	Pokok Isi/ Tujuan	Waktu Adopsi
Pemikiran Mao Zedong	Membangun Marxisme-Leninisme ala Tiongkok dengan buruh tani sebagai garda depan revolusi	Kongres Partai Komunis ke-7 tahun 1945
Pemikiran Mao Zedong	Membangun Marxisme-Leninisme ala Tiongkok dengan buruh tani sebagai garda depan revolusi	Kongres Partai Komunis ke-7 tahun 1945
Teori Deng Xiaoping	Membangun sosialisme dengan karakteristik Tiongkok	Kongres Partai Komunis ke-15 tahun 1997
Perspektif Saintifik dalam Pembangunan (<i>Scientific Outlook on Development</i>)	Mewujudkan masyarakat sosialis yang harmonis melalui sosialisme saintifik, pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan demokrasi	Kongres Partai Komunis ke-18 tahun 2012
Pemikiran Xi Jinping	Mewujudkan modernisasi sosialis (2020-2035) dan menjadi negara sosialis modern terbesar (2035-2050)	Kongres Partai Komunis ke-19 tahun 2017

Mengenai analisis kedua, ide *China Dream* yang membawa frase kebangkitan kembali Tiongkok tidak hanya berpengaruh pada relasi internal, tetapi juga relasi eksternal. Beberapa studi menunjukkan bahwa pada era Xi Jinping, politik luar negeri Tiongkok menjadi lebih “aktif” dan “kreatif” (Darmawan, 2018; Sinaga, 2020). Frase kebangkitan yang kerap diucapkan pemimpin politik Tiongkok menegaskan bahwa negara itu memiliki kepercayaan diri untuk maju dan menjadi kekuatan global, seperti yang dinyatakan Xi pada Kongres Partai Komunis ke-19 pada tahun 2017, “[T]he banner of socialism with Chinese characteristics is now flying high and proud for all to see. It means that the path, the theory, the system, and the culture of socialism with Chinese characteristics have kept developing, blazing a new trail for other developing countries to achieve modernization.” (Xinhua, 2017). Cara pandang Xi telah membangun kepercayaan diri terhadap politik luar negeri dan strategi diplomasi di arena internasional. Tiongkok, misalnya, sama sekali tidak mau berkompromi terhadap kepentingan vital dalam isu Xinjiang, Tibet, Laut Tiongkok Selatan (LTS) meskipun ditekan masyarakat global atau negara besar seperti Amerika Serikat sekali pun. BRI juga merupakan kunci bagi pemerintahan Xi

untuk meraih legitimasi masyarakat. Kebangkitan Tiongkok tidak akan berarti tanpa keberadaan Tiongkok sebagai kekuatan global (Sinaga, 2020). Namun, perlu dicatat bahwa, pada dasarnya, Tiongkok tidak ingin memulai perang dengan Barat, ataupun mengeksplor model politik mereka ke arena internasional (Tsang, 2019). Posisi *China Dream* adalah sebagai penanda ideologi Tiongkok pada era Xi Jinping (Wang, 2014).

Sebagai inisiator, pertama, kata “sejarah” menjadi kata kunci yang diucapkan Xi Jinping ketika berbicara mengenai masa depan Tiongkok, termasuk BRI. Dalam pidatonya, mengutip ide Marxisme, Xi Jinping menegaskan bahwa “*people are the creators of history*”. Untuk mencapai sejarah sebagai negara yang modern dan sejahtera, rakyat Tiongkok harus bergerak dan bekerja keras. Menurut Xi Jinping, “[e]mpty talk harms the country, while hard work makes it flourish” (Jinping, 2012b). Sementara itu, Xi Jinping juga memulai dengan sejarah Tiongkok 2000 tahun lalu ketika mereka membuat Jalur Sutra, untuk menyambungkannya dengan implementasi BRI. Xi Jinping memaknai Jalur Sutra masa lalu dengan berkata, “*Spanning thousands of miles and years, the ancient silk routes embody the spirit of peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit. The Silk Road spirit has become a great heritage of human civilization*” (Jinping, 2017). Di sinilah ide *China Dream* membawa Tiongkok untuk memiliki satu pusat implementasi politik luar negeri dalam bentuk BRI (Simonov & Withanage, 2019).

Kedua, Xi Jinping menegaskan bahwa Tiongkok harus memiliki kontribusi dalam lingkup dunia. Menurut Xi, “*China can stand firmer and stronger among the world’s nations, and make a new and greater contribution to mankind*” (Jinping, 2012a). Dari situ, BRI memiliki perbedaan yang signifikan dengan kebijakan luar negeri sebelumnya, setidaknya dalam dua hal. Pertama, ruang lingkup. BRI memiliki cakupan skala global yang membentang hingga Eropa dan Afrika. Kedua, BRI berupaya membuka jalur darat dan jalur laut sekaligus dan secara simultan berupaya mengurangi perbedaan tingkat ekonomi antara wilayah barat dan wilayah timur. Contoh jalur darat adalah Koridor Ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia yang meliputi dua jalur, yaitu jalur di bagian utara dan timur laut Tiongkok. Jalur itu membentang memasuki Mongolia dan Rusia dengan memanfaatkan jalur kereta api Trans-Siberian. Melalui jalur ini, Tiongkok bisa terhubung ke Eropa. Jalur darat lain yang memiliki peningkatan intensif adalah Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan. Koridor ini membentang sepanjang 3000 km dari Kashgar di Xinjiang ke Pelabuhan Gwadar di Pakistan. Sementara itu, contoh jalur laut adalah Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang dimulai dari LTS, Samudera Hindia, kemudian ke Eropa dan Afrika. Untuk keperluan ini, Tiongkok berinvestasi di 15 kota pelabuhan, termasuk Shanghai, Ningbo, dan Tianjin.

Definisi dan kriteria yang terbuka juga membantu BRI untuk memiliki lingkup proyek global yang luas. Pada *Belt and Road Forum* (BRF) tahun 2017, Xi Jinping sendiri sama sekali tidak menyebutkan mengenai interpretasi BRI (Tiezzi, 2017). Menurut media Tiongkok, sekitar 70 negara dan organisasi internasional berpartisipasi dalam BRI. Namun, banyak kerja sama Tiongkok dengan negara non-partisipan yang memiliki karakteristik serupa proyek BRI. Banyak juga beberapa proyek yang dimasukkan ke dalam proyek BRI meskipun telah dimulai sejak setahun sebelum BRI diperkenalkan secara resmi. Hal ini membuat Jonathan Hillman, misalnya, lebih memilih untuk menyebut “BRI-related project” daripada proyek BRI saja. Dengan demikian, BRI memiliki imej yang lebih longgar daripada kriteria-kriteria khusus tertentu (Hillman, 2018).

Keberadaan proyek BRI telah membuat Tiongkok mengurangi tensi ketegangan dalam konflik sensitif di kawasan Asia dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sekitar. Dalam

isu LTS, Tiongkok menempuh jalur-jalur bilateral, sekaligus menerima persetujuan multilateral terbatas yang diinisiasi oleh ASEAN. Tujuan dari melunaknya diplomasi Tiongkok adalah untuk mengurangi pengaruh AS di kawasan dan melakukan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara. Tiongkok harus bergerak cepat untuk mengimbangi strategi AS “*pivot to Asia*” maupun *Trans-Pacific Partnership* yang didesain untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan (Simonov & Withanage, 2019). Di Asia Timur, Tiongkok juga mulai mengadakan pertemuan trilateral bersama Jepang dan Korea Selatan, yaitu pada tahun 2015, 2018, dan 2019. Pertemuan pada tahun 2020 tertunda bukan karena persoalan dengan Tiongkok, melainkan karena tensi yang memanas antara Jepang dan Korea Selatan mengenai perang di masa lalu (NikkeiAsia, 2020). Dengan langkah-langkah di atas, Tiongkok secara proaktif memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur untuk membuat suasana yang kondusif bagi berjalannya BRI.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengamati dua kesimpulan penting. Pertama, konstruktivisme berhasil melihat bahwa ide dan persepsi Xi Jinping mengenai kebangkitan dan masa depan Tiongkok merupakan faktor pendorong terbesar yang menentukan karakteristik politik luar negeri Tiongkok saat ini. Di sini, Xi Jinping mengonstruksi ide personalnya terhadap Maoisme, Marxis-Leninis, nilai-nilai atau karakteristik khas Tiongkok, dan sejarah seabad penderitaan dan kejayaan peradaban masa lampau. Ide dan kepemimpinan Xi dipandang sebagai kontrol terhadap politik luar negeri Tiongkok yang relatif asertif terhadap negara lain, dengan tetap berfokus pada kemajuan ekonomi dalam negeri. Bagaimana pun, perubahan atau penyesuaian politik luar negeri diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi BRI.

Kedua, kajian ini melihat adanya hubungan antara cara pandang Xi Jinping terhadap kebangkitan Tiongkok dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat sepihak dalam bidang ekonomi dan keamanan. Secara global, pengaruh Xi Jinping sebagai pemimpin Tiongkok tidak dapat dipandang sebelah mata. Secara kawasan, Tiongkok berusaha melunak dan bersedia bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur demi memuluskan proyek-proyek BRI. Sampai di sini, masyarakat global digiring pada kepercayaan bahwa Tiongkok yang kuat merupakan kabar baik bagi seluruh dunia. Sebaliknya, keruntuhan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan keamanan akan menghancurkan aliran suplai ekonomi dan keamanan global.

Referensi

- Aoyama, R. (2016). One Belt, One Road?: China's New Global Strategy. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 5(2), 3–22. <https://doi.org/10.1080/24761028.2016.11869094>
- ASEAN-China Center Org. (2013). *Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament*. http://www/asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm
- Asia News. (2020). *Chinese investments in Belt and Road Initiatives plunge*. <http://asianews.it/news-en/Chinese-investments-in-Belt-and-Road-Initiatives-plunge-50603.html>
- Associated Press. (2021). *China's Communist Party, with eye on history, gives Xi Jinping the same status as Mao*. WFUV Org. <https://wfuv.org/content/chinas-communist-party-eye-history-gives-xi-jinping-same-status-mao>
- Bader, J. A. (2018). *7 things you need to know about lifting term limits for Xi Jinping*. Brookings. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/02/27/7-things-you-need-to-know-about-lifting-term-limits-for-xi-jinping/>

- BBC. (2017). *Xi Jinping 'most powerful Chinese leader since Mao Zedong*.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-china-41730948>
- Bo, X. (2018). *Backgrounder: Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era*. Xinhua. http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/17/c_137046261.htm
- Brown, K. (2018). *The world according to Xi: Everything you need to know about the new China*. Bloomsbury Publishing.
- Cai, P. (2017). *Understanding China's belt and road initiative*. Sydney: Lowy Institute for International Policy. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative>
- CBC. (2017). *China elevates Xi to most powerful leader in decades*.
<https://www.cbc.ca/news/world/china-congress-xi-jinping-1.4368588>
- CEIC. (2021). *China Direct Investment Abroad*.
<https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/direct-investment-abroad>
- Chu, B. (2017). *Chinese Whispers: Membongkar Mitos tentang China*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, A. B. (2018). Perubahan Perilaku Politik Luar Negeri Tiongkok terhadap Isu Laut Tiongkok Selatan. *Journal Sospol*, 4(2), 84–107.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.6220>
- Dollar, D. (2020). *Seven years into China's Belt and Road*. Brookings.
- Fortune. (2021). *Global 500*.
https://fortune.com/global500/2021/search/?fg500_country=China
- Garlick, J. (2020). The regional impacts of China's Belt and Road Initiative. *Journal of Current Chinese Affairs*, 49(1), 3–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1868102620968848>
- Hadiwinata, S. B. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional Arus Utama, Alternatif, Reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- He, A. (2020). The Belt and Road Initiative: Motivations, financing, expansion and challenges of Xi's ever-expanding strategy. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 4(1), 139–169.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24294/jipd.v4i1.1180>
- Hillman, J. E. (2018). *China's belt and road initiative: Five years later*. CSIS.
<https://www.csis.org/analysis/chinas-belt-and-road-initiative-five-years-later-0>
- Hussain, N., & Shakoor, F. (2017). The role of leadership in foreign policy: A case study of Russia under Vladimir Putin. *IPRI Journal*, 17(1), 1–25.
- Jinping, X. (2012a). *Achieving Rejuvenation Is the Dream of the Chinese People*. NPC Govt. <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202006/32191c5bbdb04cbab6df01e5077d1c60.shtml>
- Jinping, X. (2012b). *The People's Wish for a Good Life Is Our Goal*. NPC Govt. <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202005/c800ae87a9744e399486456f8cbe417c.shtml>
- Jinping, X. (2017). *Full text of President Xi's speech at opening of Belt and Road forum*.
https://www.mfa.gov.cn/ce/surabaya/eng/jrzg_2/t1470180.htm
- Korwa, J. R. V. (2019). Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia. *Journal Hubungan Internasional*, 8(1), 1–10.
- Kurniawan, Y. (2016). One Belt One Road (Obor): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok? *Journal Politica*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jp.v7i2.1135>
- Lamont, C., & Boduszynski, M. P. (2020). *Research Methods in Politics and International Relations*. SAGE.
- Lee, A. (2020). *Belt and Road Initiative debt: how big is it and what's next?* South China Morning Post.
- Li, J., Qian, G., Zhou, K. Z., Lu, J., & Liu, B. (2021). Belt and Road Initiative, globalization and institutional changes: implications for firms in Asia. *Asia Pacific Journal of Management*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10490-021-09770-0>

- Li, X., & Wang, W. (2015). The “Silk Road Economic Belt” and the “China Dream” Relationship: A Strategy or Tactic. *Sociology Study*, 5(3), 169–175. <https://doi.org/10.17265/2159-5526/2015.03.001>
- Li, Y. (2017). Belt and Road: A Logic Behind the Myth. In *CHINA’S BELT AND ROAD: A GAME CHANGER?* (pp. 13–33). ISPI.
- Moodys. (2019). *Moody’s: Chinese overseas infrastructure investment to slow amid growing risk awareness*. https://www.moodys.com/research/Moodys-Chinese-overseas-infrastructure-investment-to-slow-amid-growing-risk--PR_407210
- Mühlhahn, K. (2019). *Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping*. Belknap Press.
- Mulvenon, J. (2017). *Xi Jinping Has a Cool New Nickname: “Commander-in-Chief.”* <https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm51jm.pdf>
- Nedopil, C. (2020). *China’s Investments in the Belt and Road Initiative (BRI) in 2020*. <https://greenfdc.org/wp-content/uploads/2021/01/China-BRI-Investment-Report-2020.pdf>
- NikkeiAsia. (2020). *Japan, China and South Korea to delay trilateral summit to 2021*. <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-China-and-South-Korea-to-delay-trilateral-summit-to-2021>
- NikkeiAsia. (2021). *Full text of Xi Jinping’s speech on the CCP’s 100th anniversary*. <https://asia.nikkei.com/Politics/Full-text-of-Xi-Jinping-s-speech-on-the-CCP-s-100th-anniversary>
- Nye, J. S. (2019). *Trump’s Effect on US Foreign Policy*. <https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-long-term-effect-on-american-foreign-policy-by-joseph-s-nye-2019-09>
- Philips, T. (2017). *Xi Jinping becomes most powerful leader since Mao with China’s change to constitution*. <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/xi-jinping-mao-thought-on-socialism-china-constitution>
- Preston, T. (2010). Leadership and foreign policy analysis. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.255>
- Shankaran, S. (2020). *Is Xi Jinping the most powerful and dangerous man in the world?* <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/cash-flow/is-xi-jinping-the-most-powerful-and-dangerous-man-in-the-world/>
- Shepard, W. (2020). *How China Is Losing Support For Its Belt And Road Initiative*. <https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2020/02/28/how-beijing-is-losing-support-for-its-belt-and-road-initiative/?sh=7fc1f0c92199>
- Simonov, E., & Withanage, H. (2019). A Briefing on the Belt and Road Initiative. *Friends of the Earth Asia Pacific*. https://foeasiapacific.org/wp-content/uploads/2020/01/200129-FoE-APac-belt-and-road-briefing-WEB_Final.pdf
- Sinaga, L. C. (2020). XI JINPING, “CHINA DREAM”, AND CHINESE MILITARY DIPLOMACY TO ASEAN. *Journal of Asean Studies*, 8(2), 173–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/jas.v8i2.6483>
- Theys, S. (2017). KONSTRUKTIVISME. In *Dasar-dasar Kajian Teori Hubungan Internasional* (pp. 43–51). Komojoyo Express.
- Tiezzi, S. (2017). *What Did China Accomplish at the Belt and Road Forum?* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2017/05/what-did-china-accomplish-at-the-belt-and-road-forum/>
- Tsang, S. (2019). *What is Xi Jinping Thought?* Forbes. https://forbes.kz/life/observation/what_is_xi_jinping_thought/
- Wang, Z. (2014). The Chinese Dream: Concept and Context. *Journal of Chinese Political Science*, 19, 1–13. <https://doi.org/DOI.10.1007/s11366-013-9272-0>

- Week In China. (2016). *Funding Belt and Road*. <https://www.weekinchina.com/chapter/belt-and-road/how-is-belt-and-road-being-funded/>
- Wuthnow, J. (2017). Chinese Perspectives on the Belt and Road Initiative: Strategic Rationales, Risks, and Implications. *Institute for National Strategic Studies*.
- Xiangwei, W. (2017). *Analysis: how Xi Jinping revived old methods by abandoning intraparty democracy*. South China Morning Post. https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2118352/analysis-how-xi-jinping-revived-old-methods-abandoning-intraparty?module=perpetual_scroll&pgtype=article&campaign=2118352
- Xinhua. (2017). *Full text of Xi Jinping's report at 19th CPC National Congress*. China Daily. https://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm
- Yamada, G., & Palma, S. (2018). *Is China's Belt and Road working? A progress report from eight countries*. NikkeiAsia.
- Yamei. (2017). *Full text: Joint communique of leaders roundtable of Belt and Road forum*. Xinhua. http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/15/c_136286378.htm